

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dan akses dalam berbagai bidang kehidupan sosial ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan, keberadaan penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subjek yang berperan aktif dalam kehidupan sosial, bukan semata sebagai objek penerima bantuan. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kelompok disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan mereka sulit untuk berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, serta rendahnya tingkat penerimaan sosial karena perbedaan kemampuan individu (Adibowo et al., 2024).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas dengan ragam kondisi yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, sepertiga di antaranya belum menuntaskan pendidikan dasar, sementara partisipasi mereka dalam sektor ketenagakerjaan masih tergolong rendah, yakni sebesar 23,94% (Ikawati et al., 2024). Data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per Desember 2022 menunjukkan bahwa, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat mencapai 72.565 jiwa (Sukirman, 2024). Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Indonesia, dengan komposisi 42.133 laki-laki dan 30.432 perempuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (disahkan 15 April 2016) menjamin hak asasi, kesamaan kesempatan, dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam hidup mandiri tanpa diskriminasi. UU ini mengubah paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis hak asasi, serta menetapkan 22 hak dasar, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas.

Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Sosial Jawa Barat, mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pelayanan sosial seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki fungsi utama untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Salah satu lembaga yang menjalankan peran tersebut adalah UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel (GHD).

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel merupakan contoh konkret dari lembaga yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelaksana program sekaligus fasilitator pemberdayaan. Melalui program batik griya difabel yang berdiri sejak tahun 2020, UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel berupaya mewujudkan penyandang disabilitas menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi dalam kesempatan bekerja. Peneliti juga melihat bahwa strategi pemberdayaan yang efektif perlu berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, bukan sekedar intervensi sesaat. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel yang menempatkan disabilitas sebagai individu yang memiliki potensi untuk hidup mandiri dan sejahtera.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga rehabilitasi sekaligus pemberdayaan, UPTD PPS GHD menyelenggarakan beragam program yang mencakup dimensi sosial, fisik, mental, dan spiritual bagi penyandang disabilitas dengan ragam kondisi, mulai dari disabilitas mental, sensorik netra, rungu wicara, hingga disabilitas tubuh. Program-program tersebut tidak hanya bersifat rehabilitatif, tetapi juga diarahkan pada penguatan kemampuan melalui pelatihan keterampilan kerja yang beragam, seperti olah pangan, menjahit, pijat refleksi, tata rias dan barbershop, pelayanan jasa, seni lukis, hingga membuat, yang seluruhnya dirancang sebagai bekal kemandirian bagi para penyandang disabilitas setelah masa rehabilitasi (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2024). Di antara seluruh program keterampilan tersebut, Program Batik Griya Difabel tumbuh menjadi program yang paling menonjol perkembangannya. Program ini

lahir atas dua landasan utama, yaitu kondisi sosial penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses dunia kerja, serta kekayaan budaya Jawa Barat berupa seni batik yang dipandang sebagai sarana yang tepat untuk mengembangkan bakat-bakat penyandang disabilitas, terutama penyandang tunarungu dan daksa, sekaligus melestarikan warisan budaya lokal (Perdana, 2023).

Program keterampilan membatik yang telah dirintis tersebut berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif berbasis pemberdayaan dengan merek dagang Batik Griya Difabel, bahkan telah resmi terdaftar sebagai anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DeKraNasDa) Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan ekonomi yang telah dibangun melalui program ini (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2024). Kendati demikian, perjalanan Program Batik Griya Difabel dalam membangun kemandirian ekonomi penyandang disabilitas masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar, di antaranya rendahnya daya saing produk akibat belum terbentuknya ciri khas produk yang seragam, ketergantungan pada pasar antarinstansi pemerintah, serta terbatasnya kemampuan pengelolaan dan pemasaran secara mandiri (Prambudia et al., 2024). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya strategi pemberdayaan yang tidak sekadar melatih keterampilan teknis membatik, tetapi juga mencakup penguatan kemampuan pengelolaan usaha, perluasan jaringan pemasaran, dan pembangunan kemandirian ekonomi yang menyeluruh, sehingga penyandang disabilitas dapat berkembang dari penerima layanan rehabilitasi menjadi pelaku ekonomi yang berdaya dan produktif secara berkelanjutan.

Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut strategi pemberdayaan pada penyandang disabilitas melalui program batik griya difabel di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel dalam mendorong dan mendukung pengembangan penyandang disabilitas untuk menghasilkan perubahan kearah lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana strategi pemberdayaan dirumuskan, dijalankan dan di interpretasi keberhasilannya oleh lembaga tersebut. Penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan model pemberdayaan berbasis teori ACTORS dan kontribusi praktis bagi lembaga dalam menyusun strategi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini pula, diharapkan dapat ditemukan pola strategi yang mampu memperkuat posisi penyandang disabilitas sebagai subjek individu yang mandiri, produktif dan berdaya dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan sebagai berikut:

1. Apa bentuk strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui program Batik Griya Difabel pada penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel?
2. Bagaimana dampak strategi pemberdayaan melalui program Batik Griya Difabel pada penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan melalui program Batik Griya Difabel pada penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk strategi pemberdayaan melalui program Batik Griya Difabel pada penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel.
2. Untuk mengetahui dampak dari strategi pemberdayaan melalui program Batik Griya Difabel pada penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan melalui program Batik Griya Difabel pada penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan terhadap pengembangan pengetahuan di bidang sosial, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Secara umum, kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang pekerjaan sosial dan kajian pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi ilmiah bagi pengembangan teori tentang peran lembaga sosial pemerintah dalam mendorong kemandirian individu berkebutuhan khusus. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi akademisi atau peneliti lain dalam mengkaji model-model pemberdayaan yang efektif di lembaga sosial, terutama dalam konteks pelayanan sosial terhadap difabel. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan literatur ilmiah mengenai efektivitas strategi pemberdayaan yang diterapkan di lingkungan lembaga sosial daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan yang telah dijalankan. Melalui hasil temuan penelitian ini, diharapkan pihak UPTD PPS GHD dapat mengidentifikasi bentuk strategi yang paling sesuai dan berpengaruh dalam meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan klien disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah, lembaga sosial lainnya, maupun masyarakat umum dalam memahami pentingnya peran

aktor kelembagaan dalam proses pemberdayaan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kemanusiaan karena berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih efektif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

E. Kerangka Berpikir

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel merupakan salah satu lembaga pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang memberikan layanan pemberdayaan di bawah naungan Dinas Sosial. Salah satu program yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan adalah Program Batik Griya Difabel yang dilaksanakan oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel.

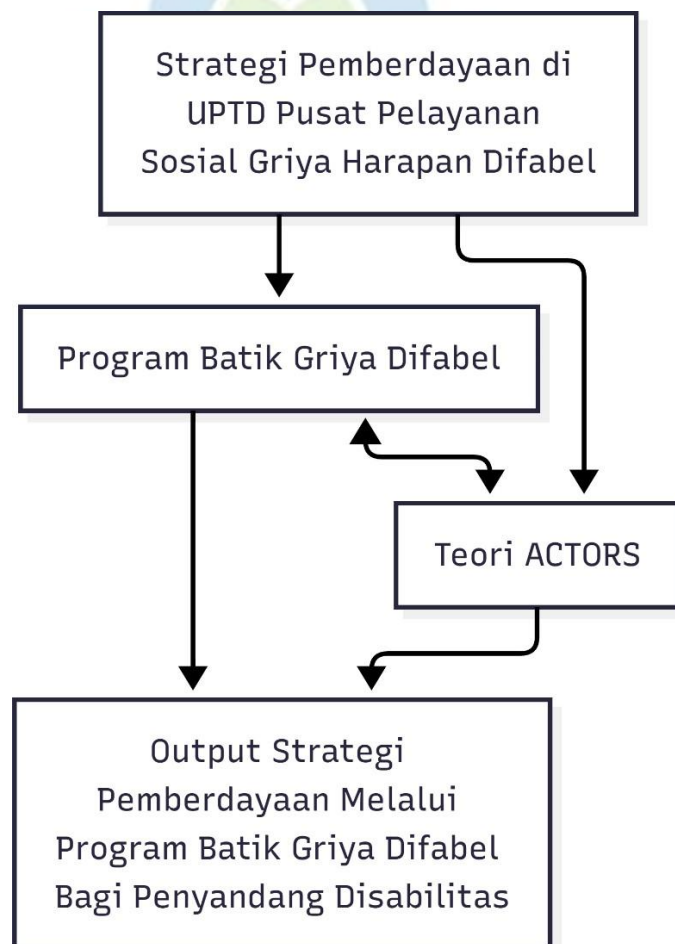
Teori pemberdayaan ACTORS memandang masyarakat sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan dengan cara membebaskan individu untuk bertanggung jawab atas gagasan, keputusan, serta tindakan yang dilakukannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa perubahan yang dihasilkan bersifat terencana dan terstruktur karena input yang digunakan telah dipersiapkan sejak awal sehingga pada tahap output akan menghasilkan perubahan yang signifikan serta optimal (Cook & Macaulay, 1996).

Strategi pemberdayaan tidak hanya berfokus pada bantuan yang bersifat sumber daya fisik, melainkan juga harus mengembangkan beberapa aspek diantaranya *authority* yang memberikan kewenangan kepada penyandang disabilitas untuk menyadari bahwa perubahan tersebut terjadi karena dirinya sendiri, *confidence* dan *competence* yang menumbuhkan rasa percaya diri untuk melakukan perubahan pada dirinya, *trust* yang memunculkan keyakinan bahwa dirinya memiliki potensi untuk mengalami perubahan, *opportunities* yaitu pemberian kesempatan untuk menentukan pilihan sendiri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, *responsibilities* yang memberikan pengelolaan sehingga penyandang disabilitas memiliki rasa tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik, serta *support* yang memberikan dukungan baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya dari berbagai pihak terkait (Cook & Macaulay, 1996).

Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program Batik Griya Difabel di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel yang memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas antara lain berupa kemandirian ekonomi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan untuk beraktivitas kembali di lingkungan masyarakat.

Untuk memudahkan pembaca memahami kerangka berpikir ini, peneliti memvisualisasikannya dalam Tabel 1.1 Tabel tersebut membantu membaca alur penelitian secara lebih jelas dan sistematis.

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti (2025)